J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Inventarisasi Kecenderungan Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Solusinya

Rika Fitriani[1], Fitri Fatimawati[2]
[1,2] STAI Yasba Kalianda, Lampung Selatan, Indonesia
E-mail: rikauni31@gmail.com[1], yofi25505@gmail.com[2]

Article History:
Received: 12 Oktober 2024
Revised: 28 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *Productive Business, Poor, Economic Challenges, Solutions, Empowerment*

Abstract: *This study, titled Inventory of Productive Economic Business Trends for the Poor, the Challenges Faced, and Solution Efforts, aims to identify the types of productive businesses managed by impoverished communities, understand the main obstacles they face in running these businesses, and propose actionable solutions. The main issue in this research is the low economic productivity among the poor due to various constraints, such as limited capital, market access, skills, and policy support. This research employs a descriptive qualitative method with a survey approach, in-depth interviews, and direct observation of productive business actors in several regions. Collected data is thematically analyzed to identify common patterns in business types, frequently encountered obstacles, and strategic recommendations that the government and relevant agencies can implement to improve economic sustainability. The study's findings are expected to serve as a reference for designing more targeted and effective economic empowerment programs for the poor.*

PENDAHULUAN

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan Sunnah rasul mengajarkan kepada ummatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan bathin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT : "Dan diantara mereka ada yang berdo'a: Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS 2:201).

Dalam ayat di atas disebutkan dua dimensi kesejahteraan dalam masyarakat Islam, antara kesejahteraan dan kemakmuran dunia dan akhirat. Dalam pandangan islam, harta dan kekayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu tujuan yang penting, namun bukan tujuan akhir, melainkan sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau sasaran utama manusia di muka bumi, melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib memanfaatkan kekayaan tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun

material. Jadi, peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan utama manusia sebagai khalifah di muka bumi, adalah sarana terbaik bagi akhirat. Tiada kebaikan bagi seseorang yang tidak berjuang mendapatkannya. Dalam hal ini, orang yang mengabaikan dan meninggalkan dunia tidak masuk dalam naungan Islam.

Kemiskinan merupakan problem sosial yang berdampak sistemik bagi kehidupan masyarakat. Kemiskinan secara otomatis menurunkan problem-problem lain yang lebih kompleks menyangkut keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Fakta nyata di lapangan mengenai efek kemiskinan menjadi bukti tak terbantahkan dimana kemiskinan sering kali melatarbelakangi timbulnya hal-hal yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat.

Allah SWT. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rezeki bagi mereka. Allah SWT. berfirman: "Allahlah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki" (QS ar-Ruum : 40).

Kemiskinan adalah keadaan dimana penghidupan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Terdapat dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan dua istilah bagi kemiskinan ini, yaitu, fuqaraa' yang merupakan jamak' (plural) dari faqir; dan masaakiin yang merupakan jamak' (plural) dari miskin. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: "Atau orang miskin yang sangat fakir" (QS al-Balad [90]: 16).

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. berfirman:"Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf" (QS al-Baqarah :233).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "miskin" diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan; berpenghasilan rendah. Sedangkan kata "fakir" diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin.

Dapat dipahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan. Allah Swt. berfirman:Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan (Al-Baqarah: 268).

Dalam hal kemiskinan Islam mempunyai suatu konsep yang jelas. Infaq, shadaqah dan zakat merupakan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah ini. Sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa solusi tersebut dalam realitasnya belum bisa mensejahterakan orang miskin. Menurut penulis ini bisa juga disebabkan karena adanya kesenjangan antara tataran ideal dengan tataran realitas.

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Berbagai program sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan sosial tersebut, tetapi kenyataan dilapangan menunjukan jumlahnya mereka bukan belum bisa berkurang secara signifikan. Terlebih lagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam setiap negara, karena adanya kemiskinan memiliki dampak terhadap permasalahan multidimensional seperti pendidikan, sosial, kesehatan, kesejahteraan keluarga, bahkan bisa saja berefek terhadap keyakinan beragama. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang menajadi PR besar oleh setiap negara tanpa

terkecuali Indonesia. Karena pada dasarnya banyak orang-orang dalam katagori kurang mampu, sehingga setiap negara selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan di setiap negaranya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan Inventarisasi Kecenderungan Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Solusinya.

LANDASAN TEORI

Inventarisasi

Yuli dan Aris dikutip (Arifudin, 2021) mengartikan inventarisasi secara umum sebagai daftar atas pencatatan barang-barang, bahan, dan sebagainya. Menurut Ibrahim Bafadal dan (Marantika, 2020) menyebutkan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Usaha-Usaha Ekonomi Produktif

BPS dikutip (Fasa, 2020) bahwa Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, industri mikro adalah usaha yang memiliki 1-4 tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa desktiptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Juhadi, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Arifudin, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Nasem, 2018).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistik secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain.

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifin, 2024).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Arifudin, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Hanafiah, 2021) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2019) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Tanjung, 2020). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Jumiati, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu inventarisasi kecenderungan usaha-usaha ekonomi produktif fakir miskin, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya solusinya.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2018) menyatakan bahwa analisis data merupakan

kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan

Islam mengkonsentrasikan pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya diberbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Sehingga, bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkraman sesuatu yang diharamkan, termasuk segala tipu daya.

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu setiap diri manusia bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga ketentraman yang meliputi hati.

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan juga masih merupakan problem nasional yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai bulan maret 2010 adalah 31,02 juta orang atau 13,33 persen dari jumlah total penduduk. Dari jumlah itu penyebaran penduduk miskin masih terkonsentrasi di desa. Penduduk miskin di kota berjumlah 11,10 juta orang, kontras dengan jumlah mereka di desa yang mencapai 19,93 juta orang atau 64,23 persen. Sejalan dengan fakta itu maka dapat dipahami, jika dari sisi profesi, penduduk miskin masih terkonsentrasi di pedesaan.

Dalam upaya mengidentifikasi upaya-upaya pengentasan kemiskinan, terlebih dahulu disini akan dikemukakan 3 penggolongan kemiskinan, sehingga akan diperoleh upaya pengentasan kemiskinan yang berangkat dari penggolongan kemiskinan ini. Penggolongan kemiskinan yang dimaksudkan disini adalah kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural.

1. Kemiskinan Kultural
   Kemiskinan kultural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Terutama yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi serta rasa malas untuk berusaha.
2. Kemiskinan Natural
   Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mengitarinya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam.
3. Kemiskinan Struktural
   Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui peningkatan peran serta dan peroduktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah,

melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan papan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang bekelanjutan untuk mendorong kemandirian golangan masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberikan peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial–ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha.

Dalam islam untuk upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan berdasarkan tiga sebab diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor Individu dan perintah bekerja

Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri.

Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya. Didalam al-Quran ditegaskan: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumuah : 10)

Bahkan Al-Quran tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang kehidupan dunia ini. Firman Allah SWT: Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain) (QS. Al-Insyirah: 7).

Anjuran bekerja keras sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh karena malas dan lemah kemauan serta sikap mental yang negatif lainnya. Sikap mental kerja keras ini perlu disuntikkan kepada mereka yang lemah kemauannya agar timbul semangat untuk bekerja mengubah nasibnya. Sebagaimana firman Allah SWT: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Al-Ra'd:11)

Islam menempatkan posisi kerja sebagai suatu aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dari manusia selama hidupnya. Artinya kebahagiaan dapat dicapai melalui aktifitas kerja yang diiringi dengan nilai-nilai transendetal spiritual, karena semua aktifitas kerja harus dilandasi moral ibadah kepada Allah. Islam mengajarkan manusia untuk berproduksi dan mengembangkan usahanya baik segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas, bahkan islam melarang menyia-nyiakan potensi alam maupun potensi Sumberdaya manusia.

Pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kurangnya akses bagi orang-orang miskin kepada usaha perekonomian mereka memang merupakan faktor krusial, yang menggagalkan usaha memperluas kepemilikan bisnis dan industri, sehingga menghambat tujuan merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi islam. Jika tindakan-tindakan efektif tidak diambil untuk menghapuskan kelemahan ini, maka berbagai kendala akan muncul di masyarakat terutama yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Untunglah islam memiliki keunggulan sistem ekonomi tersendiri di atas kapitalisme dan sosialisme dalam sistem.

Konsep kesejahteraan ekonomi islam adalah tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diukur dari segi uang, melainkan juga perbaikan dalam mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan usaha minimal yang memperhatikan tuntunan perintah islam tentang

konsumsi.

Islam mengajarkan manusia untuk berproduksi dan mengembangkan usahanya baik segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan harapan agar dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga.

2. Faktor Lingkungan Sosial Kemasyarakatan

a. Prinsip Kerjasama dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Al-Quran menegaskan hubungan kekerabatan dalam lingkungan keluarga sebagai pondasi membangun keutuhan masyarakat secara umum. Al-Quran menegaskan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab sosial pribadi dalam masyarakat lebih diutamakan untuk dibebankan kepada kerabat dan keluarga. Karena, mungkin disebabkan oleh suatu hal, seseorang yang tidak memperoleh kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka keluarga atau kerabat terdekatnyalah yang lebih bertanggung jawab terhadapnya saudaranya yang kekurangan ini. Hal ini sebagaimana ditegaskan didalam surat al-Anfal:75 berikut ini: Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) (QS Al-Anfal: 75).

Ayat ini menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Disamping itu, prinsip kerjamasama didalam al-Quran tidak hanya karena faktor kekerabatan dan kekeluargaan semata akan tetapi lebih luas lagi, prinsip kerja sama mutlak diwujudkan didalam lingkungan sosial masyarakat secara keseluruhan. Prinsip pokok yang ditegaskan oleh al-Quran dalam hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT berikut ini:… Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…(QS. Al-Maidah : 2)

Al-Quran memaparkan ajarannya secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikannya sebagai kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerjasama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.

Kerjasama ini dalam ekonomi amat penting, misalnya antara pedagang yang kuat dengan pedagang yang lemah, antara pedagang dan pembeli, produsen dan konsumen, pemilik barang dengan pemilik modal, buruh dan majikannya, dan seterusnya. Disamping itu pula islam menawarkan sebuah sistem ekonomi dengan prinsip-prinsip islam yang dimiliknya, misalnya produk-produk dalam Bank Islam.

Akad-akad tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima macam prinsip yang masing-masing dibagi ke dalam jenis-jenis produk syari'ah, yaitu; pertama, prinsip simpanan, dengan produk syari'ah : al-wadî'ah; kedua, prinsip bagi hasil dengan produk syari'ah: al-mudlârabah, al-musyârakah, al-muzâra'ah, dan al-masaqat; ketiga, prinsip pengambilan keuntungan dengan produk syari'ah: bai' al-mudlarabah, bai' bi al-tsaman 'ajil, bai' al-ta'jiri, bai' al-salâm, dan bai' al-istishna; keempat, prinsip sewa dengan produk syari'ah: 'ijârah, musyârakah; kelima, prinsip administrasi dengan produk syari'ah: al-qardl al-hasan.

b. Pemberdayaan Zakat Produktif

Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil-hasil produksi, apa pun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi

yang telah diciptakan dan dimiliki Tuhan? Bukankah manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah?.

Didalam al-Quran ditegaskan: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta, (QS. Az-Zariyat :19)

Zakat mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan membersihkan pakerti masyarakat dari perasaan dengki, karena jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menjadi cair. Dalam bidang sosial, zakat menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial, sedang dalam bidang ekonomi, zakat akan memicu peningkatan produksi dan pertumbuhan serta menyuburkan ekonomi secara ideal.

Solusi efektif pendayagunaan zakat dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan pembagian zakat yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi pemberi zakat. Salah satu cara dalam pendistribusian zakat yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahiq. Pendistribusian zakat dengan cara ini akan mendorong para mustahiq untuk melakukan usaha pada sektor rill. Hal ini akan memberikan dua efek yaitu meningkatnya penghasilan dari mustahiq dan juga akan berdampak ekonomi secara makro.

Prinsip zakat produktif dapat digambarkan ketika seorang fakir miskin yang tenaganya mampu untuk bekerja, hendaknya diberi alat-alat untuk bekerja sesuai dengan keahliannya atau diberi modal untuk berdagang agar mereka dapat melakukan perbaikan taraf hidupnya. Ditambahkan oleh Ibrahim al-Bajuri, menurutnya bahwa fakir agar diberi zakat yang dapat mencukupi biaya hidupnya sepanjang hayat menurut ukuran yang wajar. Dengan demikian efektifitas zakat produktif ini akan lebih diberdayakan dengan solusi pemberian modal, dengan istilah lain ialah memberikan pancing untuk mengail bukan hanya memberikan ikannya saja.

Dalam pelaksanaannya zakat ternyata belum bisa berjalan sesuai harapan. Adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ternyata belum bisa memaksa wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya, hal ini terait pula belum adanya peraturan pelaksana pengelolaan zakat. Potensi zakat yang 42,3 triliyun masih tinggal diangan-angan para praktisi zakat. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) Indonesia yang tidak kurang dari 242 lembaga baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi oleh masyarakat kerja bahu-membahu untuk menyadarkan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat dan menyalurkannya zakat melalui lembaga-lembaga zakat yang ada Namun kenyataannya penghimpunan zakat, infaq dan sadakah tidak lebih dari 286.412 .188.273 (Dua ratus delapan puluh enam milyar, sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Sistem zakat dalam ekonomi Islam merupakan sebagai garda terdepan sistem fiskal. Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus stabilisasi dalam perekonomian. Jika dikelola dengan baik, zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara, yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Faktor Pemerintah
   a. Membangun Sistem Ekonomi yang Adil

Selama ini perekonomian yang banyak terjadi dimasyarakat adalah sistem ekonomi yang saling mematikan, menghalalkan segala cara dan penuh persaingan. Dalam keadaan ekonomi yang demikian itu, maka pihak yang memiliki modal yang besar, memiliki sarana, ilmu dan teknologi merupakan pihak yang lebih bisa bersaing dibanding golongan pedagang kecil yang

tidak memiliki modal yang besar dan lainnya itu. Untuk itu akibatnya pedagang kecil dari golongan miskin dengan mudah dapat dimatikan oleh golongan ekonomi yang kuat.

Untuk itu diperlukan adanya prinsip-prinsip keadilan dalam rangka pemerataan perekonomian. Adanya prinsip keadilan yang diwujudkan dengan prinsip pemerataan ekonomi yang adil ini ditegaskan oleh Ibn Hazm sebagaimana dikutip oleh Amien Rais didalam bukunya Tauhid Sosial mengatakan bahwa kalau ditengah masyarakat ada kelompok kaya dan miskin, sudah jadi kewajiban kelompok kaya tadi untuk melakukan proses pemerataan sosial ekonomi ke seluruh masyarakat. Dan menjadi hak kelompok orang-orang miskin untuk mengambil haknya dari kelompok kaya.

Keadilan sosial ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Allah, digunakan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Disinilah peran serta pemerintah, guna untuk membangun sistem ekonomi yang adil menurut prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan.

Hal penting untuk mencapai pembangunan yang seimbang untuk menyediakan peluang kerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk, dan tertanggulanginya kemiskinan, maka pemerintah harus memperhatikan hal tersebut terutama di tempat-tempat dimana masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Misalnya karena mayoritas penduduk negara kita hidup di pedesaan, maka kemakmuran mereka tidak akan bisa dijamin tanpa adanya pembangunan pedesaan dan pertanian. Akan tetapi pengembangan masyarakat pedesaan tidak akan tercapai tanpa dukungan dari pembangunan industri. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pembangunan industri dan pertanian adalah dua sektor yang bersifat saling melengkapi (komplementer) yang harus mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah.

Dalam rangka pemenuhan perekonomian di negara kita, salah satunya adalah dengan menumbuhkembangkan sektor UMKM, tetapi dewasa ini realita dan fakta menunjukkan banyak kelompok UMKM sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank umum. Kondisi ini dikarenakan ganjalan struktural berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur. Ironisnya kendala itu sendiri timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bank dalam memberikan kredit mengikuti prinsip kehati-hatian atau ketentuan keamanan kredit. Survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip (Shavab, 2021) mengidentifikasikan berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya, yakni meliputi: 1) Kurangnya permodalan, 2) Kesulitan dalam pemasaran, 3) Persaingan usaha yang ketat, 4) Kesulitan bahan baku, 5) Kurang teknis produksi dan keahlian, 6) Kurangnya keterampilan manajerial (SDM), serta 6) Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Sulitnya memberikan pembiayaan bagi UMKM, karena lembaga-lembaga pembiayaan selama ini beranggapan bahwa memberi pinjaman kepada masyarakat miskin pada dasarnya beresiko. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa program kredit mikro sering berhadapan dengan besarnya biaya operasional dan rendahnya tingkat pengembalian. Sementara itu, beberapa permasalahan UMKM dalam mengakses kredit kepada perbankan antara lain: 1) Umumnya UMKM belum mempunyai pembukuan yang jelas sehingga menyulitkan perbankan untuk mengetahui informasi mengenai usaha tersebut secara lengkap, 2) Masih banyaknya UMKM yang belum terdaftar sebagai badan usaha resmi, 3) Kurangnya kemampuan sumber daya

manusia yang mengelola UMKM, serta 4) Faktor akses pemasaran produk yang dihasilkannya.

b. Penyediaan Lapangan Kerja

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi. Misalnya dengan melaksanakan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan banyak tenaga kerja atau padat karya. Contoh yang sudah dilaksanakan dalam masyarakat diantaranya program PNPM yang dalam pelaksanaannya wajib melibatkan masyarakat sekitarnya. Tetapi saat ini ternyata dalam proyek-proyek besar pemerintah malah banyak memasukan tenaga kerja dari negara asing misalnya Tiongkok. Jika hal ini tidak bisa di minimalisir bisa jadi orang orang Indonesia harus menjadi buruh di negeri sendiri, sementara yang memerintah adalah orang-orang asing.

4. Penyediaan Layanan Pendidikan

Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun ketrampilan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan layana pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki ketrampilan untuk berkarya.

Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab, pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, onovatif, dan produktif. Dengan demkian kemiskinan kultural akan dapat teratasi.

Inventarisasi Usaha-Usaha Ekonomi Produktif

Dalam konteks inventarisasi usaha-usaha ekonomi produktif, teori, pendapat, dan kebijakan hukum berperan penting untuk memahami dasar-dasar pemetaan, pengembangan, serta pemberdayaan usaha produktif khususnya di kalangan masyarakat miskin. Berikut adalah beberapa teori, pendapat, dan kebijakan hukum terkait topik ini:

a. Teori Ekonomi Produktif

Teori Kesejahteraan Ekonomi : Teori ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi produktif yang dikelola oleh masyarakat miskin dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi. Menurut Pigou dikutip (Labetubun, 2021), distribusi pendapatan yang adil melalui aktivitas ekonomi produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Teori Pemberdayaan Ekonomi : Menurut teori ini, usaha ekonomi produktif memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Narayan dikutip (Sofyan, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah proses dimana individu atau kelompok meningkatkan kapasitas mereka untuk membuat pilihan dan mengubahnya menjadi tindakan serta hasil yang diinginkan, sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan.

Teori Sumber Daya Berbasis Masyarakat : Teori ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya lokal dalam mendukung usaha produktif masyarakat miskin. Menurut Barney dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) bahwa sumber daya lokal yang unik, seperti keterampilan atau bahan baku lokal, menjadi basis dalam pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

b. Pendapat Ahli tentang Inventarisasi Usaha Produktif

1) Emil Salim menyatakan bahwa inventarisasi usaha ekonomi produktif sangat penting untuk menentukan jenis usaha yang potensial dan untuk mengarahkan dukungan tepat

sasaran dari pemerintah serta sektor swasta. Salim menekankan pentingnya data yang akurat dalam menentukan kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh usaha produktif.

2) Sofyan Djalil berpendapat bahwa inventarisasi yang baik mencakup pengumpulan informasi mengenai jenis usaha, skala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta bagaimana usaha tersebut berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Menurutnya, data yang lengkap sangat mendukung proses perencanaan kebijakan yang lebih efektif.
3) Amartya Sen menekankan pentingnya ekonomi produktif dalam meningkatkan "kapabilitas" individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sen mengungkapkan bahwa kegiatan produktif bukan hanya tentang penghasilan, tetapi juga mengenai pemberdayaan yang memberi nilai tambah bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

c. Kebijakan Hukum terkait Usaha Ekonomi Produktif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mendorong usaha produktif di kalangan masyarakat dengan memastikan adanya perlindungan, pembinaan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung keberlangsungan UMKM serta mengurangi kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Kebijakan ini mengatur percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui dukungan terhadap usaha produktif lokal. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat dan penyediaan akses pasar.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro: Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan usaha produktif melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, serta pendampingan bagi usaha mikro. Dalam konteks masyarakat miskin, kebijakan ini diharapkan mampu membantu usaha produktif berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial : UU ini mengatur tentang kesejahteraan sosial, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha produktif. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi produktif dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

d. Pendekatan Hukum Islam dalam Ekonomi Produktif

Konsep Maqashid al-Shariah : Dalam perspektif Islam, usaha produktif sejalan dengan konsep maqashid al-shariah, yang berfokus pada tercapainya tujuan-tujuan utama syariah, seperti menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pandangan ini, ekonomi produktif di kalangan fakir miskin dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Prinsip Adil dan Transparan : Islam menekankan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Berdasarkan hukum Islam, usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi prinsip kejujuran, tidak ada penimbunan, dan penetapan harga yang wajar, terutama untuk barang-barang kebutuhan dasar.

e. Penerapan Kebijakan Inventarisasi Usaha Produktif

Inventarisasi usaha produktif membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dalam hal ini, data inventarisasi mencakup jenis usaha, skala usaha, kelompok sasaran, hambatan, dan peluang usaha. Data ini akan digunakan untuk mendesain program yang efektif, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta akses ke pasar.

Dengan memahami teori, pendapat ahli, serta kebijakan hukum terkait, inventarisasi usaha produktif dapat menjadi fondasi dalam pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat fakir miskin.

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemerintah sejak era Orde Baru hingga saat ini. Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan yaitu : Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Industri Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Padat Karya, Jaring Pengaman Sosial- Program Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (JPS-PDMDKE), Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), P4K, TPSP-KUD, Unit Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan antara lain : Pertama, Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang iselenggarakan oleh panti-panti sosial. Kedua, Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Ketiga, Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri. Keempat, Program kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi bencana alam.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya orang miskin dan orang faqir adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebalikan dari orang kaya yaitu orang yang memiliki. Faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan dapat diidentifikasi dari 3 penggolongan kemiskinan yaitu kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural. Solusi al-quran dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tiga faktor yaitu faktor individu meliputi perintah untuk bekerja keras, faktor lingkungan sosial kemasyarakatan meliputi urgensi zakat produktif, prinsip membangun kerjasama dalam lingkungan kerabat dan masyarakat, serta faktor pemerintah melalui upaya membangun system ekonomi yang adil dalam masyarakat. dalam pelaksanaan menumbuhkan usaha-usaha untuk mengembangkan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Zakat dan wakaf produktif yang diharapkan bisa membantu fakir miskin mengembangkan usahanya ternyata realisasinya belum sesuai dengan hitung-hitungan dari besarnya umat muslim jika semuanya dengan sadar membayar zakat. Bank-bank islam yang diharapkan bisa menjadi tumpuan mendapatkan modal, masih menerapkan syarat-syarat yang memberatkan dalam memperoleh pinjaman serta dari faktor pemerintah yang belum bisa sepenuhnya melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, *2*(2), 151–159.

Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, *2*(3), 209–218.

Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Global (PT.GM). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, *3*(2), 184–190.

Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong Di Subang Jawa Barat. *Integritas : Jurnal Pengabdian*, *4*(1), 21–36.

Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, *5*(1), 286–298.

Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, *1*(1), 50–58.

Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, *1*(2), 131–140.

Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.

Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *5*(2), 213–220.

Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(2), 172–178.

Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *16*(2), 17-32.

Jumiati, E. (2024). Women's Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 1568–1576.

Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Marantika, N. (2020). *Manajemen Humas Sekolah*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 209–218.

Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, *4*(2), 341–352.

Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *10*(1), 71–80.

Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, *1*(1), 42–52.